



## PEMIKIRAN FILOSOFIS PAULO FREIRE TERHADAP PERSOALAN PENDIDIKAN DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM MERDEKA BELAJAR DI INDONESIA

Gede Agus Siswadi<sup>1\*</sup>

<sup>1)</sup> Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

<sup>\*)</sup> e-mail korespondensi: [gede.agus.siswadi@mail.ugm.ac.id](mailto:gede.agus.siswadi@mail.ugm.ac.id)

Article Submitted: 1 Januari 2022; Accepted: 9 Agustus 2022; Published: 1 September 2022

### Abstract

*Education is an attempt to humanize humans. However, it becomes a paradox if there is dehumanization in education. Teachers are not oppressors and students are not oppressed. Thus, the idea put forward by the educational philosopher Paulo Freire about liberating education. The thoughts of Paulo Freire have relevance to the education system for “Merdeka Belajar” in Indonesia which was initiated by Nadiem Anwar Makarim as the Minister of Education and Culture, with the aim of providing freedom in the world of education. This research uses a literature study method, with data analysis using the Miles and Huberman pattern. The results in this study are 1). Paulo Freire's thoughts on liberating education have relevance to the “Merdeka Belajar” in Indonesia which both emphasizes the humanism aspect of education. 2). Paulo Freire's thinking emphasizes the problem posing method of education, no longer with a banking of education system where teachers only give and students only receive. 3). The policy of “Merdeka Belajar” is important for reconstructing the national education system and it is important to remember the diversity of potentials possessed by students which cannot be uniformed. Teachers are no longer busy with administrative tasks, but it is more important for teachers to have a lot of time with their students in conducting dialogue and solve all forms of academic problems during the teaching and learning process.*

**Keywords:** Education, Freedom, “Merdeka Belajar”, Paulo Freire.

### I. PENDAHULUAN

Berbicara tentang pendidikan menjadi suatu tema yang sentral. Bagaimana tidak, karena pendidikan merupakan bagian penting dalam proses kemajuan suatu bangsa serta peradaban. Di atas pundak pendidikanlah terdapat suatu kewajiban serta tanggung jawab yang besar untuk menentukan prestasi bangsa, sehingga pendidikan bukanlah semata-mata sebagai usaha dan aktivitas spekulatif. Melainkan, pendidikan harus mempunyai dasar filosofis dan ilmiah yang menjamin pencapaian tujuan untuk meningkatkan perkembangan sosio-budaya yang bermartabat. Bahkan, seorang Nelson Mandela yang pernah menjadi presiden di Afrika Selatan berseru bahwa pendidikan adalah senjata ampuh untuk mengubah dunia.

Pendidikan dalam pengertian yang sederhana dan umum sebagaimana dijelaskan oleh (Anwar, 2015) bahwa pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan serta mengembangkan berbagai potensi-potensi bawaan dari peserta didik, baik jasmani ataupun rohani



sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai serta norma-norma tersebut dan mewariskannya kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan. Oleh karena itu, bagaimana pun peradaban suatu masyarakat, di dalamnya berlangsung dan terjadi suatu proses pendidikan sebagai usaha untuk melestarikan hidupnya.

Proses pendidikan menekankan pada proses perkembangan untuk menjadi dewasa, dalam artian dewasa secara kognitif, afektif dan juga psikomotorik. Persoalan ini tentunya menyangkut pada sistem nilai dan asas normatif suatu kebudayaan. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan potensi manusia agar menjadi lebih baik. Manusia selalu memerlukan pendidikan agar mampu mempertahankan hidup atau mencapai kehidupan yang lebih baik. Atas dasar itulah, pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebaliknya, manusia mempersoalkan masalah-masalah pendidikan. Oleh sebab itu, manusia dan pendidikan terjalin hubungan kausalitas, yaitu saling membutuhkan satu sama yang lain, sehingga dengan potensi itu manusia dapat dididik dan dilatih dengan cipta, rasa, dan karsa manusia (Pohan, 2019).

Melihat potret pendidikan di Indonesia, yakni sistem pendidikan yang dibuat adalah sentralistik. Maksudnya adalah penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh pemerintah sebagai penguasa. Sekolah adalah lembaga yang dibuat oleh negara, untuk kepentingan negara. Sistem pendidikan yang dijalankan sampai saat ini belum memperlihatkan hasil yang signifikan serta optimal sesuai dengan fungsi pendidikan yang sesungguhnya. Pendidikan di Indonesia nampaknya sudah tidak menunjukkan keberhasilannya ditinjau dari aspek pedagogis. Dunia pendidikan sekarang dinilai kering dari dimensi pedagogik, dan sekolah lebih tampak mekanis, sehingga seorang anak didik cenderung kerdil karena tidak mempunyai dunianya sendiri. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu upaya baru dalam menjalankan proses belajar dan mengajar. Metode baru serta berbeda dengan yang ada selama ini. Dan salah satu metode yang dinilai tepat dijalankan adalah konsep pendidikan dari Paulo Freire yang menganggap bahwa pendidikan merupakan proses yang membebaskan.

Pendidikan pada intinya harus mampu menjadikan peserta didik sebagai manusia yang seutuhnya, bukan lagi berpandangan subjek sebagai pendidik dan objek sebagai peserta didik. Pendidikan harus membebaskan peserta didik dari segala bentuk ketertindasan. Pendidikan tidak boleh melahirkan suatu kaum yang saling berkuasa karena itu memicu terjadinya penindasan dalam pendidikan. Karena pendidikan harus mampu memberikan kebebasan, melatih peserta didik agar dapat mengenal seluruh subjek pendidikan itu sama. Anak didik selayaknya dapat memandang guru dan teman itu sebagai subjek pendidikan, yang mana antar subjek pendidikan itu bersama saling memecahkan dan saling melakukan pendidikan. Dalam artian siswa belajar dari guru, tetapi tidak menutup kemungkinan juga seorang guru dapat belajar dari siswa. Terjadinya dialogis itulah yang dapat disebut sebagai makna pendidikan yang sejatinya.

Kondisi pendidikan yang banyak mengalami berbagai persoalan dalam berbagai hal, seperti kurikulum, sarana dan prasarana maupun juga sumber daya manusianya. Dengan demikian sebuah pendidikan perlu mendapatkan sebuah terobosan baru dengan metode yang kritis progresif yakni sebuah pendidikan yang memerdekakan, membebaskan peserta didik dari tekanan dalam pembelajaran. Dengan pendekatan kritis progresif ini tentunya akan menyebabkan kesadaran kritis muncul sebagai unsur yang penting bagi berkembangnya proses pendidikan, sehingga diharapkan mampu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kritis dan progresif (Tosaini, 2005).



Dalam konteks ini, guru tidak hanya sebagai tenaga pengajar saja, yang memberikan perintah dan murid menerima perintah, guru mengatur dan murid yang diatur, guru memberi dan murid menerima, namun guru juga harus sebagai pekerja kultural sebagaimana yang dijelaskan oleh Paulo Freire guru sebagai aksi kultural untuk pembebasan dan juga aksi kultural untuk dominasi dan hegemoni. Dengan demikian pemikiran-pemikiran humanis revolusioner dari Paulo Freire dalam bidang pendidikan sangat penting untuk dikaji lebih mendalam serta komprehensif, serta bagaimana relevansinya dengan sistem pendidikan merdeka belajar, sebagaimana sistem pendidikan yang digaungkan saat ini. Oleh karena itu dengan kajian ini diupayakan dapat memberikan gagasan yang lebih kompleks lagi dalam membangun sistem pendidikan di Indonesia untuk menjadi lebih baik dan lebih harmonis.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (studi kepustakaan) yakni sebuah metode yang fokus pada proses membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian dengan memanfaatkan sumber kepustakaan sebagai sumber primer dalam sebuah penelitian yang dilakukan (Zed, 2004). Sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber pustaka yang memberikan sumbangsih serta relevan dengan topik kajian seperti pada buku-buku, artikel ilmiah, skripsi, tesis, dan juga bentuk karya ilmiah lainnya yang mendukung dari kajian yang dilakukan. Penelitian ini juga mengkaji pemikiran tokoh filsafat pendidikan yakni Paulo Freire, menelusuri pemikirannya dalam bentuk karya-karya yang ditulisnya ataupun karya orang lain yang mengkaji gagasan serta pemikiran dari Paulo Freire. Dari data-data yang diperoleh peneliti kemudian menganalisis dengan teknik analisis Miles dan Huberman yakni mulai dari data koleksi, kemudian reduksi data yakni memilah-milah data yang relevan, kemudian penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan terhadap data yang telah dianalisis secara mendalam tersebut.

### 2.1 Riwayat Hidup Paulo Freire dan Pemikiran Kritisnya tentang Pendidikan

Paulo Freire adalah sosok pemikir dalam ranah pendidikan, hal ini karena Freire memiliki perhatian yang serius terhadap berbagai persoalan-persoalan dalam pendidikan. Sebagai seorang filsuf pendidikan, gagasannya tentang pendidikan cukup berpengaruh pada abad ke-20. Paulo Freire dilahirkan di Recife, Brasil pada tanggal 19 September 1921. Ayahnya bernama Joaquim Temistocles Freire dan ibunya bernama Edeltrus Neves Freire. Ketika krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1922 serta berdampak pada Brasil dan menyebabkan orangtua dari Freire mengalami kejatuhan finansial. Sehingga saat itu Freire terpaksa untuk belajar mengerti apa artinya lapar bagi anak sekolah. Pengalaman yang mendalam akan kelaparan yang dialami oleh Freire saat masih kecil menyebabkan Freire pada umur sebelas tahun untuk mengabdikan hidupnya pada perjuangan melawan kelaparan serta kesengsaraan serta bertekad agar tidak ada lagi anak-anak yang lainnya mengalami kelaparan serta kesengsaraan sebagaimana yang dialami oleh Freire pada masa itu (Mansyur, 2014).

Pendidikan Paulo Freire tertinggal selama dua tahun dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya akibat kesengsaraan yang ia alami. Kemudian pada umur lima belas tahun ia lulus dengan nilai yang cukup, dan setelah melihat kondisi dari keluarganya yang mulai membaik, ia memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya dan masuk di Universitas Recife dengan memilih untuk konsentrasi di Fakultas Hukum. Freire juga belajar filsafat dan juga psikologi bahasa.



Pada tahun 1944, Freire menikah dengan Elza Maia Costa Olivera dan merupakan seorang guru sekolah dasar yang berasal dari Recife. Dari pernikahannya tersebut ia dikaruniai lima orang anak, tiga putri, dan dua diantaranya putra. Dengan mengamati aktivitas istrinya sebagai guru, Freire menaruh minat serta perhatiannya pada bidang pendidikan, bahkan ia sering membaca dan ingin memahami teori-teori pendidikan dibandingkan dengan hukum (Mansyur, 2014).

Paulo Freire merupakan salah satu tokoh pemikir yang produktif pada masanya. Berbagai karya penting telah dihasilkannya serta ia dengan lugas mengulas tentang pendidikan serta merelasikannya dengan berbagai kehidupan, seperti ekonomi, sosial dan juga politik. Dalam berbagai karyanya, Freire memberikan kesaksian tentang realitas kehidupan masyarakat yang miskin serta terbelakang, yang disebabkan oleh sikap pembiaran yang dilangsungkan secara sengaja untuk melanggengkan *status quo*. Bahkan bagi Freire, praktek-praktek pendidikan yang berlangsung dalam kondisi tersebut pun secara sengaja diatur untuk mengokohkan ketimpangan tersebut. Akibatnya adalah terjadinya gumpalan keuntungan yang tidak merata antara satu golongan dengan golongan yang lainnya (Fitriansyah, 2019).

Pemikiran Paulo Freire secara umum adalah humanisasi, yaitu pendidikan yang senantiasa diarahkan pada usaha untuk membantu masyarakat, terutama pada kaum yang tertindas, serta pendidikan yang difokuskan pada kepentingan masyarakat, dan bukan atas kemauan dari penguasa (Larasati, 2020). Paulo Freire juga mengkritik bahwa sistem pendidikan hanya berpacu pada *banking of education system*, atau pendidikan layaknya hanya transfer antara nasabah dengan pihak bank. Freire menegaskan bahwa pendidikan gaya sistem bank itu ditandai dengan ketika guru mengajar dan murid belajar, guru mengetahui segala sesuatu sedangkan murid tidak mengetahui apa apa, guru berpikir sedangkan murid dipikirkan, guru menentukan peraturan dan murid yang diatur, guru memilih dan melaksanakan pilihannya sedangkan murid menyetujuinya, guru bercerita sedangkan murid mendengarkan, guru berbuat sedangkan murid membayangkan dirinya berbuat melalui perbuatan gurunya, guru memilih bahan dan isi pengajaran sedangkan murid tanpa diminta pendapatnya menyesuaikan diri dengan pelajaran itu, guru mencampuradukkan kewenangan ilmu pengetahuan dan kewenangan jabatan yang dia lakukan untuk menghalangi kebebasan muridnya, dan terakhir adalah guru sebagai subjek sedangkan murid sebagai subjek belaka (Freire, 1972).

Menurut Freire realitas pendidikan adalah aktivitas menindas. Artinya dalam sebuah pendidikan tidak terlepas dari adanya peran guru yang bertindak layaknya penindas. Peserta didik pun secara sadar menjadikan dirinya sebagai orang yang tertindas. Freire mengargumentasikan hal ini bahwa ketika pengetahuan diyakini sebagai anugerah yang dihibahkan oleh mereka yang menganggap dirinya berpengetahuan (guru) kepada mereka yang dianggap tidak memiliki pengetahuan apa-apa (peserta didik) dan menganggap bodoh secara mutlak kepada orang lain, hal ini menurut Freire adalah sebuah ideologi penindasan yang berarti mengingkari pendidikan dan pengetahuan sebagai proses pencarian.

Selanjutnya pendidikan yang hanya menggunakan pendekatan gaya bank, bagi Freire bahwa mereka tidak menyadari kalau mereka sedang bekerja untuk tujuan dehumanisasi, tidak memahami bahwa pengetahuan yang mereka tanamkan berisi kontradiksi dengan realitas yang ada. Bahkan, kondisi pendidikan telah membuat siswa untuk tidak mampu berpikir kritis terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar, akibatnya siswa malah terjerumus untuk ikut berubah dan bukan untuk mengubah situasi yang ada. Hal ini terjadi di



mana siswa bukanlah individu yang tidak memiliki hak atas dirinya dan disibukkan dengan sistem yang ada (Ajat & Hambali, 2021).

Berdasarkan dari berbagai persoalan dalam pendidikan Paulo Freire mengemukakan bagaimana pendidikan seharusnya merupakan proses humanisasi, sehingga konsepnya adalah pendidikan yang membebaskan. Pendidikan yang membebaskan memiliki arti bahwa sebuah pendidikan harusnya berbanding lurus dengan konsep yang akan hadir dalam keseharian. Dalam konsep pendidikan yang membebaskan, proses belajar-mengajar melibatkan peran aktif yang kolektif antara dua subjek yaitu guru dan murid dengan mengedepankan sistem yang dialogis, bukan sebagai sistem subjek objek, yang selalu menjadi subjek adalah guru, sedangkan objeknya adalah murid. Selain itu dalam konsep pendidikan yang membebaskan posisi murid bukanlah sebagai media yang harus ditabungi dengan pengetahuan melalui metode ceramah. Tetapi, sebaliknya menempatkan individu sebagai sesama subjek yang sedang mencari realitas yang terjadi. Dengan demikian, mekanisme pendidikan yang membebaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh Freire harus menempuh dua tahapan yaitu pendidikan yang hadap masalah dan pendidikan yang dialogis (Freire, 2007).

Freire mengemukakan metode yang ia sebut sebagai *problem posing education* yang merupakan sebuah metode alternatif menghapuskan konsep pendidikan gaya bank. Pada konsep pendidikan gaya bank ini guru berperan sebagai penabung pengetahuan dan siswa hanya berperan sebagai wadah dari tabungan pengetahuan tersebut. Guru berperan sebagai pemegang hak penuh dalam narasi yang akan disampaikan, siswa hanya menerima, menyimpan dan mengulang. Persis seperti ketika kita menabung atau berinvestasi di bank, maka yang akan kita dapatkan nanti adalah hadiah, dan analogi ini sama seperti dalam pendidikan model bank, siswa nantinya akan mendapatkan hadiah berupa nilai yang diberikan oleh guru (Roberts, 2000). Jadi, ketika nantinya siswa mendapatkan transkrip nilai, serta diwisuda itu sama halnya dengan ia sedang memecahkan celengan atau hadiah yang ia peroleh dari sistem pendidikan gaya bank tersebut.

Pendapat Freire mengenai pendidikan hadap masalah merupakan pendidikan yang lebih mengutamakan pada intensionalitas serta komunikasi. Pendidikan hadap masalah ini pada intinya adalah pendidikan yang “sadar akan”. Selain itu pendidikan hadap masalah ini juga lebih menekankan pada tindakan pemahaman yang dalam prosesnya suatu objek dapat dipahami oleh semua. Pada konteks ini, pendidikan hadap masalah memposisikan guru sebagai individu yang sama-sama mencari realitas. Artinya, tidak hanya siswa saja sebagai subjek belajar, namun guru juga dapat menjadi subjek belajar. Dengan demikian, pada praktiknya adalah pendidikan hadap masalah berusaha untuk menumbuhkan kesadaran dan melibatkan kesadaran kritis untuk memahami realitas dunia (Ajat & Hambali, 2021). Pandangan ini tentunya, menghilangkan sekat-sekat bahwa hanya gurulah sebagai yang maha tahu, sedangkan siswa diposisikan sebagai individu yang harus diberi tahu karena ketidaktahuannya. Sehingga, konsep humanisme dalam pendidikan akan senantiasa terjadi dalam konteks belajar mengajar di sekolah.

Lebih lanjut menurut Paulo Freire, konsep pendidikan dengan menekankan pendidikan hadap masalah memungkinkan konsientisasi. Dalam hal ini, pendidik bukanlah merupakan orang yang maha tahu dan peserta didik bukan juga seseorang yang sama sekali tidak tahu atau belum tahu dan oleh karenanya diberi tahu. Peserta didik harus aktif mencari tahu dengan





mengkonstruksi pengetahuan, dan tugas pendidik adalah membantu agar pencarian pengetahuan itu dapat berjalan dengan baik. Hubungan yang demikian menyebabkan keduanya secara sadar saling berinteraksi dan juga menumbuhkan daya pemikiran kritis bagi para peserta didik dan juga pendidik. Dengan demikian, keduanya saling memanusiakan.

Unsur dialog dalam pendidikan hadap masalah merupakan hal yang penting dalam terjadinya proses pendidikan, terjadinya pertemuan antar manusia dengan perantara dunia. Dialog merupakan suatu keharusan yang bersifat eksistensial bagi kehadiran manusia bersama dan dengan dunia. Dalam konteks ini, dialog memungkinkan terjadinya sebuah relasi timbal balik antara pendidik dengan peserta didik, adanya relasi tersebut bertujuan untuk membangun sebuah dunia yang manusiawi oleh pikiran dan tangan manusia sendiri. Dengan memahami pendidikan hadap masalah ini dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah sebuah kegiatan belajar bersama antara pendidik dan peserta didik dengan perantara dunia, oleh objek-objek yang dapat dikenal, yang dalam konsep pendidikan bank (*banking of education*) hanya dimiliki oleh pendidik. Pendidik tidak lagi sekadar memberikan pengajaran, namun dialog antara peserta didik dan pendidik yang juga merupakan proses belajar (Murtiningsih, 2004).

Konsep penting lain yang dikemukakan oleh Paulo Freire adalah konsientisasi yakni proses kemanusiaan yang khusus dan eksklusif, kondisi ini hanya akan terjadi pada manusia apabila manusia telah menyadari bahwa dirinya hidup tidak hanya dalam dunia tetapi bersama dunia. Pada dimensi ini, Freire menjelaskan bahwa individu sebagai yang terdepan dan aktif berpikir sebagai subjek, terlibat langsung dalam permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang jelas dan nyata serta dengan metode yang dialogis. Inti dari konsep konsientisasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Freire adalah ingin menumbuhkan kesadaran dan pemikiran yang kritis dengan cara menghubungkan pembelajaran dengan pembangkitan kesadaran. Terkait dengan proses konsientisasi, Freire mengkategorikan kesadaran dalam tiga kondisi, yakni kesadaran magis, kesadaran naif dan yang terakhir adalah kesadaran kritis. Dengan demikian, konsientisasi sesungguhnya bergerak dalam menumbuhkan kesadaran kritis yang membuat individu siap berpartisipasi dalam dunia.

Hal senada disampaikan dalam (Suparno, 2001) bahwa dengan konsientisasi, guru mengajar siswa untuk belajar, bukan untuk menghafal, setelah proses pembelajaran itu selesai, siswa sendiri tetap terus belajar serta mengembangkan diri untuk selalu mengubah diri. Tindakan mengajar yang dilakukan guru sama dengan yang dilakukan siswa, serta guru mengerti apa yang diajarkannya. Maka, jelas bahwa mengajar adalah tindakan kreatif dan kritis, bukan hanya mekanis belaka. Keingintahuan guru dan siswa bertemu dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, menurut Paulo Freire konsientisasi ini sebagai proses menjadi manusia yang lebih utuh, atau proses perkembangan kesadaran menuju kesadaran kritis.

## 2.2 Sistem Pendidikan Merdeka Belajar di Indonesia

Sistem pendidikan merdeka belajar merupakan konsep yang pertama kali dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Anwar Makarim pada saat berpidato acara Hari Guru Nasional tahun 2019. Konsep merdeka belajar ini merupakan respons terhadap kebutuhan sistem pendidikan pada era revolusi industri 4.0. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyebutkan konsep merdeka belajar merupakan kemerdekaan berpikir, dan



yang menentukan kemerdekaan berpikir ini adalah guru. Jadi, kunci utama yang menunjang sistem pendidikan merdeka belajar ini adalah guru (Yamin & Syahrir, 2020).

Nadiem Makarim dalam pidatonya sebagaimana yang dikutip oleh (Yamin & Syahrir, 2020) menerangkan bahwa peran guru sangatlah mulia sekaligus juga sulit. Mengapa demikian, dalam sistem pendidikan nasional guru diberikan tanggung jawab untuk membentuk karakter serta masa depan bangsa, namun terlalu banyak diberikan aturan ketimbang pertolongan. Guru ingin membantu muridnya untuk mengejar ketertinggalan di kelas, tetapi terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan administrasi tanpa manfaat yang jelas. Guru mengetahui potensi siswa tidak dapat dikur hanya semata-mata dari hasil ujian, namun guru dikejar oleh angka yang didesak oleh berbagai pemangku kepentingan. Guru ingin mengajak siswanya untuk ke luar kelas serta belajar banyak hal dari lingkungan serta dunia sekitarnya, tetapi kurikulum yang demikian padat menutup petualangannya. Guru sangat frustrasi bahwa di dunia nyata kemampuan berkarya dan berkolaborasi menentukan kesuksesan anak, bukan dari kemampuan menghapalnya. Guru mengetahui bahwa setiap anak didiknya memiliki kebutuhan yang berbeda, tetapi keseragaman mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Guru ingin setiap siswanya terinspirasi, tetapi guru tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi.

Singkatnya adalah konsep merdeka belajar sebagaimana yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia merupakan tawaran dalam merekonstruksi serta menata ulang sistem pendidikan nasional. Artinya adalah bagaimana sistem pendidikan yang akan dilaksanakan sekarang dan berikutnya merupakan bentuk evaluasi dari berbagai persoalan pendidikan yang ada di Indonesia, sehingga sistem merdeka belajar ini merupakan upaya untuk penyesuaian pendidikan dengan kemajuan serta perubahan zaman. Dengan cara mengembalikan hakikat pendidikan yang sesungguhnya, yaitu pendidikan untuk memanusiakan manusia atau pendidikan yang membebaskan. Dalam konsep merdeka belajar, antara guru dan siswa saling berbaur serta sama-sama menjadi subjek dalam pembelajaran, bukan dibatasi oleh prinsip yang kaku guru sebagai subjek pendidik dan siswa dianggap sebagai objek yang dididik. Dengan demikian, guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber kebenaran bagi siswa, namun guru dan siswa saling berkolaborasi bergerak untuk mencari kebenaran. Artinya, posisi guru di ruang kelas bukan untuk menanam atau menyeragamkan kebenaran sesuai dengan pandangan guru, namun menggali kebenaran, memiliki kesadaran kritis untuk melihat berbagai fenomena di dalam realitas dunia.

Peran guru dalam konsep merdeka belajar adalah lebih banyak terlibat sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Upaya memfasilitasi yang dilakukan oleh guru perlu ditunjang dengan usaha peningkatan kompetensi secara berkala, melalui ikut pelatihan praktik dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak lembaga sekolah. Kemampuan guru dan lembaga pendidikan dalam memfasilitasi siswa dalam bingkai konsep merdeka belajar harus dilakukan dengan konsisten dan berkesinambungan agar dapat mengimplementasikan merdeka belajar dengan baik untuk mencetak generasi unggul di masa yang akan datang (Hafid & Mahsun, 2020).

Hal yang menjadi poin penting dalam implementasi merdeka belajar adalah dengan mengarahkan siswa agar mampu dalam menyelesaikan masalah dan mampu menelaah permasalahan dengan menggunakan kemampuannya. Secara konseptual kemampuan tersebut dikenal dengan istilah *High Order Thinking Skills*, yang berkaitan dengan kemampuan kognitif



yang lebih tinggi yang dimiliki oleh siswa untuk bisa digunakan dalam menghubungkan, memanipulasi, dan mengubah pengetahuan-pengetahuan serta pengalaman yang sudah dimiliki secara kritis dan kreatif untuk menyelesaikan masalah dalam situasi yang lebih kompleks (Saputra, 2016).

Setelah diterapkannya sistem ataupun kebijakan pendidikan merdeka belajar, akan terjadi banyak perubahan nantinya, terutama dari sistem pembelajarannya. Sistem pembelajaran yang sekarang hanya dilaksanakan di dalam kelas akan berubah dan membuat situasi yang nyaman dalam pembelajaran serta bagaimana untuk memudahkan interaksi antara guru dengan murid. Salah satunya adalah belajar dengan *outing class*. Program *outing class* ini merupakan salah satu program pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas siswa agar memiliki keterampilan dan keahlian tertentu. *Outing class* juga merupakan metode yang menyenangkan, mengajarkan para siswa untuk lebih dekat dengan alam dan lingkungan sekitar (Baro'ah, 2020).

Jadi, pada intinya merdeka belajar ini lebih menekankan bagaimana belajar itu tidak terkungkung dengan tembok dengan empat dinding atau yang disebut kelas itu, namun sekarang pendidikan diarahkan kepada kebebasan dari siswa tersebut untuk lebih mengeksplor dunia serta lingkungannya, serta difasilitasi oleh gurunya. Konsep merdeka belajar ini, sebagaimana telah dijelaskan bahwa, guru tidak hanya berkutat dengan administrasi tanpa kejelasan serta prinsip aktual dari administrasi tersebut, namun lebih ke penyederhanaan administrasi dan yang paling terpenting adalah hakekat, esensi serta target dan tujuan dari sebuah pendidikan tersebut dapat tercapai dengan baik dan maksimal.

### **2.3 Humanisme dalam Pemikiran Paulo Freire dan Relevansinya dengan Sistem Merdeka Belajar**

Melihat dari kedua konsep pendidikan baik yang dijelaskan oleh Paulo Freire maupun dalam konsep pendidikan merdeka belajar dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki tujuan yakni pendidikan yang humanis. Nampak dilihat seorang tokoh serta pemikir di bidang pendidikan Paulo Freire sangat getol mengungkapkan kritiknya dengan berbagai karya seperti "Pendidikan yang Membebaskan", di samping itu Kemendikbud dengan kebijakan serta programnya adalah "Merdeka Belajar" yang dengan semangat untuk mengkonstruksi sistem pendidikan dengan nuansa serta suasana belajar yang nyaman, riang gembira, bahagia serta tanpa beban, baik itu oleh peserta didik, pendidik, ataupun lembaga atau instansi pendidikannya.

Sistem pendidikan yang dijelaskan oleh Paulo Freire adalah sebuah sistem yang lebih menitikberatkan pada kebebasan, kemerdekaan dalam belajar. Jika kita runutkan pemikiran Freire dalam konteks pendidikan, ia dengan tegas menyatakan bahwa sistem pendidikan yang ada pada masanya itu seperti pendidikan gaya bank (*banking of education system*) yakni guru hanya sebagai pemberi saja kepada muridnya, dan murid hanya mendengarkan, menampung, serta mengingat-ingat kembali apa yang disampaikan oleh guru, dan seketika waktu pengetahuan itu dibutuhkan, maka akan dikeluarkan. Ketika waktunya telah tiba, maka murid akan mendapatkan transkrip nilai ataupun ijazah dengan melihat seberapa banyak tabungan yang dimiliki oleh sang murid tersebut, demikian juga transkrip nilai yang ia peroleh.





Sebuah metode yang ditawarkan oleh Paulo Freire dalam pendidikan adalah sistem pendidikan hadap masalah. Guru tidak hanya memposisikan dirinya sebagai orang yang maha tahu, sedangkan siswanya sebagai orang yang tidak tahu. Namun, di sini guru memiliki peran sebagai fasilitator dan teman belajar. Guru tidak lagi sebagai sosok yang menakutkan bagi siswanya, tetapi posisi guru dan siswa adalah sejajar, tidak ada lagi batasan subjek sebagai pendidik, dan objek sebagai peserta didik, namun sekarang harus memiliki posisi yang sama-sama subjek, dalam artian terjadinya sebuah dialog antara guru dengan siswa untuk memahami berbagai realitas kebenaran. Jadi, jelaslah di sini guru bukanlah sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan dianggap maha benar sehingga harus dipatuhi oleh siswa, namun lebih dari itu. Siswa tetaplah patuh kepada gurunya, namun dalam konteks ini tidak ada yang dikatakan sebagai kaum penindas dan tidak ada juga sebagai kaum yang tertindas, keduanya memiliki posisi yang sejajar serta menggali permasalahan, kemudian memecahkan permasalahan tersebut secara bersama-sama. Akhir dari sistem pendidikan hadap masalah ini adalah bagaimana seorang siswa telah memiliki kesadaran kritis di dalam dirinya, serta mampu mengelola secara mandiri informasi yang diperolehnya, serta kembali merefleksikan kepada dirinya terhadap kebermanfaatan pengetahuan dan juga informasi yang diperolehnya, sehingga mampu untuk mengambil sikap terhadap konstruksi pengetahuan yang diperolehnya dalam proses pembelajaran.

Kebijakan merdeka belajar pada hakikatnya adalah wujud aktualisasi serta mendobrak sistem pendidikan nasional gaya lama. Merdeka belajar yang digaungkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memiliki tujuan untuk memposisikan peserta didik sebagai subjek belajar dengan bebas, merdeka serta memiliki rasa senang dalam mengikuti proses belajar mengajar, bukan lagi diselimuti oleh rasa takut, terpaksa, tertindas dan lain sebagainya. Apabila kita telusuri bentuk kebijakan yang dikeluarkan dalam merdeka belajar ini dapat dijumpai terdapat empat pokok bahasan dalam kebijakan merdeka belajar ini, yaitu Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) digantikan dengan bentuk asesmen yang pelaksanaannya diserahkan kepada pihak sekolah. Asesmen ini diselenggarakan untuk menilai kemampuan dari peserta didik dalam bentuk tes tertulis maupun bentuk penilaian lainnya yang bersifat lebih komprehensif, seperti dalam bentuk penugasan ataupun bentuk penilaian portofolio.

Selanjutnya adalah Ujian Nasional (UN) ditiadakan. Dan peran UN digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dengan penilaiannya meliputi aspek literasi, numerasi, dan juga survei karakter (Afida et al., 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa dalam hal evaluasi pembelajaran, kemampuan siswa tidak dapat diseragamkan dengan bentuk penilaian yang berstandar, namun di sini bagaimana bentuk evaluasi dalam pembelajaran lebih kepada penekanan terhadap potensi serta kemampuan anak didik tersebut yang beragam, sehingga yang ditekankan adalah aspek literasinya, bagaimana anak didik tersebut mampu untuk menalar serta berpikir kritis dan mampu memecahkan persoalannya dengan menggunakan nalarnya, atau dalam penilaiannya disebut (*Higher Order Thinking Skills*)/ HOTS. Dan yang terakhir adalah survei karakter yang berkaitan dengan karakter dari siswa tersebut dalam pembelajaran misalnya, nilai gotong royong, cinta tanah air, kedisiplinan, dan lain sebagainya.

Berikutnya adalah format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sangat dipersingkat, bahkan ketika kita bandingkan dengan RPP Kurikulum 2013 dengan komponen-



komponennya bisa mencapai hingga 20 halaman, namun dengan kebijakan merdeka belajar ini aspek RPP menjadi dipersingkat hanya mencakup esensi dari pembelajaran seperti tujuan, kegiatan pembelajaran dan juga penilaian. Hal ini mencerminkan bahwa guru diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berdialog dengan siswanya di dalam kelas, tidak lagi disibukkan dengan administrasi dalam pendidikan, tanpa menyentuh aspek ketercapaian dalam proses pembelajaran. Bahkan, guru-guru lupa untuk mengajar karena disibukkan dengan administrasi yang terlalu menjelimet. Dengan demikian, kebijakan ini telah memberikan ruang dan waktu yang lebih panjang lagi di dalam kelas serta mengevaluasi pembelajarannya dengan lebih maksimal lagi. Sehingga tujuan dari pembelajaran dapat dicapai dengan baik dan maksimal.

Kebijakan yang terakhir adalah berkaitan dengan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru. Dalam kebijakan ini Kemendikbud memberikan fasilitas kepada daerah untuk mengakomodir ketimpangan akses dalam pendidikan. Dengan diterapkannya sistem zonasi yaitu 50% jalur zonasi, 15% jalur afirmasi dan 5% jalur perpindahan, sisanya adalah jalur prestasi yang disesuaikan dengan kondisi daerah (Afida et al., 2021). Kebijakan ini tentunya memberikan efek yang signifikan terhadap pendidikan, terutamanya dalam hal akses secara merata. Artinya peserta didik dengan mudah untuk mengakses pendidikan yang ada di lingkungan daerahnya, tanpa lagi ada stigma sekolah unggulan dan lain halnya. Dengan akses pendidikan yang merata, memungkinkan siswa untuk saling belajar dan berbaur dengan teman-temannya tanpa harus tergolong yang berprestasi dan lain sebagainya, serta memungkinkan misalnya siswa yang tergolong perekonomiannya rendah dapat mengakses pendidikan negeri yang ada pada daerahnya masing-masing.

Pada intinya konsep pendidikan merdeka belajar yang dicanangkan oleh Nadiem Makarim sebagai Mendikbud adalah memiliki kesejajaran dengan sistem pendidikan yang dikemukakan oleh Paulo Freire. Kedua konsep ini sama-sama menekankan aspek kebebasan, kemerdekaan dan keleluasaan dari lembaga pendidikan dalam mengeksplorasi secara maksimal kompetensi dari peserta didik. Rumusan dari kedua konsep itu akan sama-sama menghasilkan makna yang senada, yakni si pembelajar atau peserta didik harus bebas dan berkembang secara natural, dan si pendidik atau guru bukan hanya sebagai *giver* atau pemberi saja, namun sebagai teman atau mitra belajar dan fasilitator. Guru bukanlah sebagai penindas, dan siswa juga bukanlah makhluk yang tertindas, tetapi sama-sama sebagai subjek belajar, bukan dibatasi oleh subjek objek. Dengan demikian, unsur kebebasan dan juga merdeka dalam belajar merupakan unsur yang penting dalam lingkungan belajar.

### III. PENUTUP

Bertumpu dari pemaparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang membebaskan adalah hal yang terpenting dalam pendidikan dalam usaha untuk memanusiakan manusia atau pendidikan yang humanis. Dalam pendidikan tidaklah diharapkan adanya bentuk eksploitasi serta menjadikan peserta didik tertindas, merasa ketakutan, kecemasan oleh bayang-bayang pendidikan, tetapi bagaimana untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, riang gembira, *enjoy*, dan tanpa sekat pembatas antara guru dengan siswa.

Sebagaimana dalam pemikiran Paulo Freire bahwa, pendidikan seharusnya tidak lagi bergaya pabrik, yang hanya mencetak siswa sebagai pekerja. Pendidikan tidak hanya



mengorientasikan dirinya pada kebutuhan lapangan kerja. Pendidikan juga tidak bergaya bank (*banking of education*), yakni guru hanya memberikan, dan siswa hanya menerima, dan setelah tiba waktunya siswa akan mendapatkan jumlah tabungannya berupa transkrip nilai ataupun ijazah sesuai dengan pengetahuan yang telah disimpangkannya dalam tabungan tersebut. Namun, pendidikan yang diharapkan adalah pendidikan yang hadap masalah, dan siswa diharapkan untuk memiliki kesadaran kritis dan mampu untuk merefleksikan pengetahuan yang diperolehnya. Dan hal ini memiliki keselarasan dengan sistem pendidikan merdeka belajar di Indonesia, yakni sebuah kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk humanisasi, memerdekakan, serta peserta didik memiliki kebebasan untuk belajar tanpa lagi memiliki kecemasan, ketertindasan dan bentuk dehumanisasi pendidikan lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afida, I., Diana, E., & Puspita, D. M. Q. A. (2021). Merdeka Belajar dan Pendidikan Kritis Paulo Freire dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman*, 12(1), 45–61.
- Ajat, A. S., & Hambali, R. Y. A. (2021). Analisis Filsafat Paulo Freire Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 5(1), 14–32.
- Anwar, M. (2015). *Filsafat Pendidikan*. Depok: Kencana.
- Baro'ah, S. (2020). Kebijakan Merdeka Belajar sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Tawadhu*, 4(1), 1063–1073.
- Fitriansyah, M. N. (2019). *Konsep Pendidikan Humanis Paulo Freire dan Relevansinya dengan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*. Malang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Freire, P. (1972). *Pedagogy of The Oppressed*. Trans. Myra Bergman Ramos. Australia: Penguin Books.
- Freire, P. (2007). *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: LP3ES.
- Hafid, & Mahsun. (2020). Konsep Merdeka Belajar dan Pentingnya Kemampuan Memetakan Dunia Kerja. *Al-Fikrah*, 3(2), 108–124.
- Larasati, D. (2020). Pendidikan Humanis Paulo Freire dalam Perspektif Pendidikan Islam [Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah]. In *Jurnal Ilmiah Islamic Resources*.
- Mansyur, M. H. (2014). Pendidikan Ala “Paulo Freire” Sebuah Renungan. *Jurnal Ilmiah Solusi*, 1(1), 64–76.
- Murtiningsih, S. (2004). *Pendidikan Alat Perlawanan: Teori Pendidikan Radikal Paulo Freire*. Yogyakarta: Resist Book.
- Pohan, J. E. (2019). *Filsafat Pendidikan: Teori Klasik Hingga Postmodernisme dan Problematikanya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Roberts, P. (2000). *Education, Literacy, and Humanization*. London: Bergin & Garvey.
- Saputra, H. (2016). *Pengembangan Mutu Pendidikan Menuju Era Global: Penguatan Mutu Pembelajaran dengan Penerapan HOTS (High Order Thinking Skills)*. Bandung: SMILE's Publishing.
- Suparno, P. (2001). Relevansi dan Orientasi Pendidikan di Indonesia. *Basis*, 01(02).
- Tosaini, R. (2005). *Konsep Pedagogi Pengharapan Paulo Freire sebagai Alternatif Pemecahan*



- Masalah Pendidikan Anak Jalanan di Indonesia (Telaah Filsafat Pendidikan)*. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Yamin, M., & Syahrir, S. (2020). Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar (Telaah Metode Pembelajaran). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1), 126–136. <https://doi.org/10.36312/jime.v6i1.1121>
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional.